

DINAMIKA POLITIK“KETERWAKILAN”DI BABEL: Studi Awal Pemilukada Gubernur Bangka Belitung Tahun 2017

Oleh: Ranto, S.IP., M.A

A. Prolog: Apa yang dipersiapkan?

Menjelang Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur di Bangka Belitung (Babel) tahun 2017, kita menyaksikan bagaimana proses pencarian kandidat yang kemungkinan berkompetisi mulai ditampilkan di media-media lokal. Tiga hari yang lalu, Hidayat Arsani¹ dengan percaya diri mengusulkan sejumlah nama seperti Andrea Hirata² dan Darmansyah Husein³ untuk mendampingi sebagai calon wakil gubernur di tahun 2017

nanti (Bangkapos, 25/2/2016). Sebelumnya, Rustam Efendi⁴ juga mulai berani mengungkapkan keinginannya agar didampingi oleh Yusroni Yazid⁵ sebagai calon wakilnya di Pemilukada 2017 yang akan datang (Bangkapos, 2/2/2016).

Meskipun peristiwa ini masih terlalu dini untuk disimpulkan, keikutsertaan beberapa figur yang disebutkan tadi—tak menutup kemungkinan sejumlah nama lainnya juga akan muncul seiring perkembangan isu-isu politik kontemporer—semakin menarik untuk diikuti. Oleh karenanya, masih sangat memungkinkan peta politik yang muncul saat ini bergeser sesuai dengan kebutuhan dan konsumsi politik yang berkembang.

Meski demikian, paling tidak, ada kecenderungan utama yang akan mewarnai kontestasi politik di tahun 2017 ini, yakni: monopoli isu-isu kedaerahan yang dianggap sebuah kebutuhan riil karena paling mewakili kedaerahan antara Putra Daerah Pulau Bangka-Putra Daerah Pulau Belitung.

Sebagai sebuah provinsi yang memang secara spasial ditakdirkan untuk terpisah oleh daratan dua pulau yang besar, keterwakilan keku-

1 Wakil Gubernur Babel Periode 2012-2017. Menurut rencana, Hidayat Arsani akan mencoba peruntungannya kembali dalam memperebutkan jabatan gubernur Babel di Pemilukada 2017. Saat ini, Hidayat Arsani merupakan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) di Babel.

2 Andrea Hirata merupakan seorang seniman sekaligus penulis novel dari kalangan terdidik yang berhasil menjadikan wisata di Pulau Belitung begitu populer jika dibandingkan dengan wisata di Pulau Bangka. Berkat karyanya melalui novel tetralogi Laskar Pelangi, publik nasional dan internasional lebih mengenal Belitung dibandingkan dengan Bangka untuk menikmati spot-spot wisata yang ditawarkan oleh kedua pulau ini. Terkait dengan munculnya nama ini—terlepas diterima atau tidak tawaran dari Hidayat Arsani—kita harus mengabaikan latarbelakang sosiologis dari aspek demografi seperti usia dan profesi. Hal yang tidak boleh kita abaikan terkait dengan latarbelakang kedaerahan yang melekat dari masing-masing calon kandidat. Seperti yang terlihat dibagian selanjutnya nanti, aspek kedaerahan ternyata tidak bisa diremehkan dalam hal proses kandidasi di Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Babel. Bahkan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan (catatan pribadi).

3 Darmansyah Husein merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Babel yang pernah menduduki jabatan bupati Belitung periode 2008-2013. Di tahun 2012 mencalonkan sebagai wakil gubernur Babel yang berpasangan dengan Zulkarnain Karim.

4 Gubernur Babel Periode 2012-2017 dipastikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Babel kembali bertarung di Pemilukada Babel 2017 setelah mendapat restu dari Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Selain memiliki status sebagai Ketua DPD PDIP Babel, Rustam Efendi juga berstatus gubernur incumbent. Berdasarkan dua status strategis tadi, tentu saja memberikan kemudahan bagi Rustam untuk mendapatkan tiket resmi pencalonan dari Megawati Soekarno Putri (catatan pribadi).

5 Bupati Kabupaten Bangka periode 2007-2012 yang sekaligus merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Babel.

tan-kekuatan politik yang dimanifestasikan dengan kewajiban “Putra Daerah” harus ditampilkan merupakan kenyataan politik yang tidak bisa dihindarkan. Alasannya, agar aspirasi politik dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa dilaksanakan secara maksimal dan merata (tanpa ketimpangan) sehingga diperlukan adanya keterwakilan dari “Putra Daerah” di kedua pulau ini.

Benarkah demikian? Perlu ditekankan disini, sebagai sebuah provinsi yang diatur secara konstitusional, dugaan-dugaan yang dijadikan dalih pembenaran pentingnya bermain di isu-isu kedaerahan ini merupakan jawaban yang menyesatkan seperti yang digelisahkan oleh Agus Badaw (Bangkapos, 27/2/2016). Boleh jadi, munculnya segmentasi kedaerahan merupakan cara paling jitu untuk menyembunyikan kelemahan dari masing-masing politisi terkait agenda menyelamatkan Babel dari ancaman kemiskinan, kerusakan lingkungan, minimnya akses lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, banjir dan lain-lain. Sehingga, kebutuhan bagi masyarakat Babel untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik secara sadar dikalahkan dengan isu kedaerahan—menurut dugaan saya—yang tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat luas. Oleh karenanya, tulisan singkat ini mencoba untuk menggugat pengarus utamaan isu kedaerahan di atas isu kemiskinan, banjir, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.

B. Realitas Politik Berbasis Primordial di Babel: Sebuah Catatan Masa Lalu dan Kini

Untuk melihat kenyataan politik yang bekerja di garis-garis sentimen primordial (kedaerahan) di Babel, saya sengaja menggunakan data-data agregat berdasarkan pengalaman di beberapa Pemilihan Umum (Pemilu)—baik ketika Babel masih menjadi bagian dari Provinsi Suma-

tera Bagian Selatan (Sumbagsel), Sumatera Selatan (Sumsel), hingga menjadi sebuah Provinsi Baru di tahun 2000—untuk menjelaskan terbentuknya struktur politik yang berbasis primordial.

Mencermati hasil Pemilu di tahun 1955, perolehan suara Partai Baperki⁶ sejumlah 8% disumbang oleh masyarakat di Babel merupakan prestasi yang gilang gemilang dan perolehan suara tertinggi dari partai ini jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di seluruh Indonesia (Evans, 2003; Ranto, 2014).

Selanjutnya, di Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 1999, perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB)⁷ di Pulau Belitung sejumlah 11% (persen)—melampaui perolehan PDIP dan Golkar, dan Partai Pilar yang mendapatkan dukungan politik dengan angka 5% dari Pulau Belitung—padahal secara nasional Partai Pilar hanya berhasil mengumpulkan suara sejumlah 0,04% atau 40.000 suara secara nasional (Evans, 2003; Ranto, 2014).

Berdasarkan dua catatan politik yang telah disebutkan, paling tidak telah memberikan penjelasan awal—sekaligus menegaskan—bekerjanya politik primordial di Babel berdasarkan basis kedaerahan (Ranto, 2014). Dari dua pengalaman pemilu yang bersejarah ini kemudian dijadikan

6 Partai Baperki merupakan partai politik yang digawangi oleh politisi dari kalangan Tionghoa di Indonesia.

7 Seperti yang diketahui, di tahun 1998, Yusril Ihza Mahendra beserta rekannya mendirikan partai politik ini. PBB memang telah lama dipersiapkan untuk menjadi sebuah partai politik sebelum euforia reformasi bergulir. Untuk melihat perjalanan PBB menuju partai politik di era reformasi dapat dilihat dalam buku yang disusun oleh Hairus Salim HS dkk yang berjudul: “Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999”, LKIS, Yogyakarta, 1999. Hadirnya sosok Yusril di PBB tentu menjadi magnet dukungan bagi pemilih di Babel, secara khusus di Pulau Belitung. Begitu juga dengan Partai Pilar. Partai Pilar secara struktur didominasi oleh putra-putra daerah dari Babel dikepengerusan partai. Tentu saja, banyaknya putra daerah asal Babel di Partai Pilar menjadikan partai ini lebih populer di Babel jika dibandingkan dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia (PLOD UGM, 2004; Ranto, 2014)

sebagai landasan awal untuk melihat peta kekuatan politik yang ada di Babel seperti yang terlihat dibagian selanjutnya.

Kalau di Pemilu 1955 dan Pemilu 1999— disebut sebagai rezim partai politik⁸— telah menunjukkan bekerjanya sentimen primordial di Babel tentu saja masih perlu diuji kembali kesahihannya. Boleh jadi, bekerjanya sentimen primordial di era ini karena disebabkan keterbatasan akses pilihan-pilihan politik yang ada. Atau, bisa juga karena masyarakat di Babel masih “miskin” informasi untuk menilai kinerja partai politik yang terpaksa harus mereka pilih.

Untuk menyempurnakan jawaban atas bekerjanya garis-garis politik berbasis primordial, mau tak mau, kita harus melihat peta-peta politik yang telah dihasilkan oleh model pemilihan untuk legislatif dan eksekutif dalam sistem terbuka (liberal) yang dimulai sejak Pileg 2004, Pemilukada Gubernur 2007, Pileg 2009 dan Pemilukada 2012. Sebagai permulaan, saya akan mengawalinya dari Pileg untuk DPR, DPD, dan Gubernur.

Tabel 1. Sebaran Perolehan Suara Partai Politik Pada Pileg 2004 untuk DPRRI

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai	Perolehan Suara Kandidat	Perolehan Kursi
1	PDI P	88.302	Rudianto Tjen (18.604)	1
2	GOLKAR	76.162	Azhar Romli (24.284)	1
3	PBB	64.631	Yusron Ihza (63.137)	1
4	PPP	29.314	-	-
5	PKS	23.495	-	-
6	PAN	19.835	-	-
7	PD	18.868	-	-
8	PKB	14.246	-	-
9	PBR	11.257	-	-
10	Partai Lainnya	48.550	-	-
Jumlah		Jumlah: 394.660		3

Sumber: Ranto, 2014

Hasil akhir perolehan suara di Pileg 2004 mengantarkan politisi dari kalangan Pulau Bangka untuk memperoleh dua kursi, yakni Azhar

Ramli (Azhar) dari Golkar, dan Rudianto Tjen dari PDIP. Sedangkan terpilihnya Yusron Ihza Mahendera (Yusron) dari PBB yang berasal dari Pulau Belitung seakan melengkapinya keterwakilan proporsionalitas struktur sosial di Babel.

Jika dilihat komposisi perolehan suara masing-masing politisi, suara terbanyak pertama diperoleh oleh Yusron sejumlah 63.137 suara. Perolehan suara Yusron ini cukup didominasi dari wilayah Pulau Belitung. Kemudian disusul oleh Azhar sebanyak 24.284 suara yang sebaran suaranya mayoritas didapatkan dari Pulau Bangka. Dan, di urutan ke tiga, diperoleh oleh Rudianto Tjen sebanyak 18.604 suara sudah mulai terlihat bagaimana domain partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif terpilih sedikit melemah meskipun masih diikat dengan sistem nomer urut. Berbeda dengan pemilu-pemilu selanjutnya seperti Pileg 2009 dan Pileg 2014 untuk pemilihan anggota DPR/DPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan suara terbanyak yang didapatkan oleh kandidat yang dukungan politiknya didapatkan dari sumbangan pemilih di Pulau Bangka. Hasil Pileg 2004 menegaskan masih kuatnya pertarungan politisi antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung dalam percaturan politik di Babel (Ranto, 2014). Lalu bagaimana dengan Pileg 2009?

Tabel 2. Sebaran Perolehan Suara Politisi untuk DPR di Babel pada Pileg 2009

No	Nama Partai	Perolehan Suara Partai	Perolehan Suara Kandidat	Perolehan Kursi
1	PDI P	88.141	Rudianto Tjen (53.129)	1
2	GOLKAR	71.995	Basuki Tjahja Purnama (35.416)	1
3	PD	47.381	Paiman (12.731)	1
4	PKS	42.320	-	-
5	PPP	37.967	-	-
6	PBB	33.060	-	-
7	PAN	26.579	-	-
8	GFRINDERA	21.707	-	-
9	HANURA	21.661	-	-
10	Partai Lainnya	68.416	-	-
Jumlah		Jumlah: 459.227		3

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu 2009 Dalam Angka yang dikutip Ranto, (2014).

8 Pemilihan kata “rezim partai politik” disini hanya untuk menjelaskan bagaimana proses keterwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih domain keputusan partai politik, sehingga perolehan suara kandidat sama sekali tidak ada dan tidak diperhitungkan. Di Pileg 2004

Tabel 2 memberikan informasi total jumlah perolehan suara sah sejumlah 459.227 suara. Ke tiga partai peserta Pileg 2009 yang berhasil meraih perolehan suara tertinggi diraih oleh PDIP, Golkar, dan Partai Demokrat (PD). Perolehan suara ketiga partai tadi jika digabungkan berjumlah 251.710 atau lebih dari 50 persen pemilih di Dapil Babel mempercayakan aspirasi politiknya kepada ke tiga partai ini (Ranto, 2014).

Secara rinci, Ranto (2014) mencatat perolehan suara politisi yang terpilih berikut ini: Pertama, Rudianto Tjen mendapatkan suaranya berikut ini: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 5.740 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 22.166, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 8.246, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 7.562, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 5.868, Dapil 6 Babel (Belitung—2.372—dan Belitung Timur—1.175); kedua, Ahok mendapatkan suaranya tersebar di beberapa daerah seperti: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 3.327 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 2.149, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 2.674, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 1.496, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 2.128, Dapil 6 Babel (Belitung—6.714—dan Belitung Timur—16.928). ketiga, perolehan dukungan untuk Paiman tersebar berikut ini: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 2.136 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 4.430, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 984, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 1.728, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 2.183, Dapil 6 Babel (Belitung—1.050—dan Belitung Timur—220).

Dari tiga kouta kursi yang diperebutkan di Dapil Babel untuk DPR misalnya, dua kursi diperoleh oleh politisi asal Pulau Bangka, yakni Rudianto Tjen (Tjen) politisi PDIP dan Paiman dari Partai Demokrat. Sedangkan dari Pulau Belitung diwakili oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang merupakan politisi Golkar ketika itu. Hasil Pileg 2009 juga mengulangi fenomena di

Pileg 2004 yang menunjukkan ketatnya pertarungan bagi politisi yang mewakili Pulau Bangka dan Pulau Belitung (Ranto, 2014).

Berikutnya, bagaimana dengan fenomena pemilihan senator (DPD RI) yang mewakili Babel di Senayan? Apakah pola-pola kekuatan politik yang dihasilkan dari Pileg 2004 dan Pileg 2009 telah mengikuti pembilahan struktur sosial yang diwakili oleh Pulau Bangka dan Pulau Belitung—seperti yang telah disebutkan tadi? Atau, arena politik untuk DPD RI ini memberikan warna struktur politik yang berbeda?

Berdasarkan hasil Pileg 2004 untuk DPD RI di Babel, dari jatah 4 kursi yang tersedia telah mengantarkan sejumlah politisi seperti Rusli Rahman (Bangka), Rosman Djohan (Bangka), Djamilia Somad (Bangka) dan Fajar Fairi (Belitung). Pengalaman di Pileg 2004 nampak bagaimana persaingan politik masih didominasi oleh kandidat yang berasal dari Pulau Bangka.

Selanjutnya, hasil Pileg 2009 untuk arena DPD RI juga memberikan potret politik yang tidak berubah diantara politisi dari gugusan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Seperti yang diketahui, Pileg 2009 telah mengantarkan Noorhari Astuti (Bangka), Rosman Djohan (Bangka), Bahar Buasan (Bangka) dan Tellie Gozalie (Belitung). Meski demikian, menyimak sebaran perolehan suara politisi yang terpilih ini cukup penting dalam menjelaskan bekerjanya politik primordial di Babel.

Untuk lebih jelasnya, catatan akhir perolehan suara masing-masing politisi dapat disimak berikut:⁹ Pertama, Tellie Gozalie mendapatkan total suaranya sebanyak 81.613 yang tersebar berikut ini: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 7.494 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 10.686, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 5.259, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 7.154, Dapil 5 Babel (Bangka Se-

9 Informasi ini dikutip dari Ranto (2014).

latan) 3.198, Dapil 6 Babel (Belitung—23.865—dan Belitung Timur—23.957); kedua, Noorhari Astuti mendapatkan total suaranya dengan angka 65.952 yang tersebar di beberapa daerah seperti: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 5.732 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 21.496, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 6.946, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 9.974, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 16.689, Dapil 6 Babel (Belitung—1.727—dan Belitung Timur—3.388). ketiga, perolehan dukungan untuk Rosman Djohan sebanyak 23.175 suara yang mana sebarannya berikut ini: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 6.033 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 3.283, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 7.508, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 1.781, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 3.552, Dapil 6 Babel (Belitung—305—dan Belitung Timur—713). Keempat, Bahar Buasan mendapatkan total suaranya sebanyak 21.700 yang tersebar berikut ini: Dapil 1 Babel (Pangkalpinang) 5.754 suara, Dapil 2 Babel (Bangka) 6.069, Dapil 3 Babel (Bangka Tengah) 4.113, Dapil 4 Babel (Bangka Barat) 2.251, Dapil 5 Babel (Bangka Selatan) 1.791, Dapil 6 Babel (Belitung—736—dan Belitung Timur—986). Berdasarkan catatan sebaran dukungan politik yang didapatkan oleh kandidat, maka dapat disimpulkan bahwa Pileg 2009 untuk DPD RI juga belum berhasil membawa pemilih di Babel keluar dari jeratan sentimen kedaerahan (Ranto, 2014).

Lalu, bagaimana dengan konstestasi politik di arena eksekutif daerah? Setelah pemberlakuan rekrutmen pemilihan kepala daerah semisal Gubernur/Walikota/Bupati dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, maka analisis politik yang berkembang tidak lagi bergantung pada struktur kekuatan partai politik yang ada. Oleh karenanya, mencermati kehadiran kandidat yang berkompetisi menjadi faktor penting untuk menjelaskan dinamika kekuatan politik di level lokal

seperti Gubernur misalnya.

Berdasarkan dua pengalaman Pemilukada Gubernur secara langsung di tahun 2007 dan 2012 yang lalu memberikan beberapa catatan khusus terkait dengan keberadaan politik berbasis primordial di Babel: kewajiban untuk mengakomodasi putra-putra daerah terbaik dari kedua gugusan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Fenomena demikian secara elektoral memang penting untuk dipertimbangkan agar mendapatkan dukungan simpatik pemilih di Babel. Persoalannya tidak saja hanya berkuat disegmentasi keterwakilan. Menurut saya, publik di Babel juga harus diberikan pertimbangan-pertimbangan kapasitas calon pemimpin yang dimunculkan agar aspirasi politik yang berkembang dikelompok elit politik dan massa berjalan seirama.

Tabel 3. Informasi Pasangan Calon

Tahun	Nama Pasangan	Status	Asal Daerah
2007	Hudarni Rani	Calon Gubernur	Pangkalpinang
	Ishak Zainudin	Calon Wakil Gubernur	Belitung
	Sofyan Rebuin	Calon Gubernur	Pangkalpinang
	Anton Gozalie	Calon Wakil Gubernur	Belitung
	Basuki Tjahja Purnama	Calon Gubernur	Belitung Timur
	Eko Cahyono	Calon Wakil Gubernur	Bangka Barat
	Eko Maulana Ali	Calon Gubernur	Bangka
	Syamsudin Basari	Calon Wakil Gubernur	Belitung
	Fajar Fairi	Calon Gubernur	Belitung
	Hamza Suhaimi	Calon Wakil Gubernur	Pangkal Pinang
2012	Eko Maulana Ali	Calon Gubernur	Bangka
	Rustam Efendi	Calon Wakil Gubernur	Belitung
	Yusron Ihza Mahendera	Calon Gubernur	Belitung
	Yusroni Yazid	Calon Wakil Gubernur	Bangka
	Zulkarnain Karim	Calon Gubernur	Pangkalpinang
	Darmansyah Husein	Calon Wakil Gubernur	Belitung
	Hudarni Rani	Calon Gubernur	Pangkalpinang
	Justiar Noer	Calon Wakil Gubernur	Bangka Selatan

Sumber: diolah dari berbagai sumber (catatan pribadi)

Bila dicermati dari informasi yang baru saja disajikan, paling tidak mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan: pentingnya mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan dari daerah Pulau Bangka dan Pulau Belitung dalam kandidat politik untuk level provinsi di Babel. Di Pemilukada 2007 misalnya, semua pasangan yang berkompetisi memutuskan untuk memilih tokoh-tokoh politik yang berlatarbelakang Pulau Bangka dan Pulau Belitung dalam menarik simpatik dukungan dari publik di Babel yang mengikuti pola berikut: jika calon gubernurnya berasal dari daerah Pulau Bangka (Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka misalnya) maka dipastikan calon wakil gubernurnya dari Pulau Belitung (Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur). Begitu juga sebaliknya. Jika calon gubernurnya berasal dari Pulau Belitung (Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur) maka wakil gubernurnya berasal dari daerah Pulau Bangka (Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat).

Fenomena yang sama juga berulang—meski tidak semuanya—di Pemilukada 2012. Terlihat bagaimana pola yang telah terbentuk di tahun 2007 juga diwariskan oleh aktor-aktor politik di Babel pada tahun 2012. Hanya pasangan Hudarni Rani-Justiar Noer yang tidak mengikuti pola tersebut (sama-sama dari Pulau Bangka).

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan, pertimbangan kedaerahan di Babel telah menjadi kesepakatan bersama yang tak tertulis terkait dengan politik berbasis primordial. Kenyataan ini telah terlihat sejak Pemilu 1955, 1999, yang kemudian diikuti oleh Pileg 2004, Pemilukada 2007, Pileg 2009 dan Pemilukada 2012. Begitu juga dengan Pileg 2014¹⁰ dan peristiwa yang

10 Sangat disesalkan sekali dalam diskusi kali ini saya tidak berhasil menampilkan data perolehan suara untuk DPR dan DPD Daerah Pemilihan (Dapil) Babel untuk Pileg 2014 karena keterbatasan data yang tersedia..

berulang juga akan terjadi di Pemilukada 2017.¹¹

C. Akar Menguatnya Politik Primordial di Babel

Kalau dibagian sebelumnya telah disebutkan bagaimana politik di Babel secara sederhana dapat dijelaskan melalui pendekatan primordial berbasis kedaerahan, selanjutnya, saya mencoba untuk menelusuri faktor yang melatarbelakangi menguatnya kecenderungan politik berbasis kedaerahan. Paling tidak, saya menawarkan beberapa kerangka pendekatan melalui perubahan institusional dan ketersumbatan keterwakilan politik untuk menjelaskan dinamika politik yang begitu dominan di Babel.

1. Perubahan Institusional

Reformasi politik yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1997 memberikan kabar baik bagi Babel dalam memperjuangkan sebuah provinsi baru agar terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan (Palembang). Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000. Berdirinya Babel sebagai sebuah provinsi diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di dua gugus pulau besar yang terpisah (Pulau Bangka dan Pulau Belitung) dalam hal pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Ranto, dkk, 2007).

Banyak hal yang melatarbelakangi Babel harus bercerai dengan provinsi induknya Palembang. Yang paling sentral adalah: masalah keti-

11 Untuk Pemilukada 2017, informasi di bagian pendahuluan (Prolog) telah mengantarkan kita pada sebuah informasi bagaimana dinamika politik Putra Daerah mulai semarak seiring dengan kebutuhan-kebutuhan politik elektabilitas kekinian. Untuk menjawab dan memberikan kepastian ini kita harus sedikit bersabar dan menunggu di waktu-waktu yang akan datang menjelang menit terakhir penetapan pasangan kandidat yang akan berkompetisi.

dakmerataan akses pembangunan di Babel jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Palembang—padahal Babel memiliki Sumber Daya Alam (timah) yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional dan lokal (Palembang). Kenyataannya elit politik di Babel merasa diperlakukan kurang adil oleh Palembang (catatan pribadi).

Menjadi sebuah provinsi baru ternyata tidak berjalan dengan mulus seperti yang dibayangkan—bersamaan dengan ini beragam masalah mulai muncul. Menurut laporan penelitian integratif yang dilakukan oleh S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada (UGM) di tahun 2004 telah memperkirakan berbagai masalah yang muncul dan dihadapi oleh Babel berkisar dipersoalan dimensi politik, identitas kultural, administrasi, ekonomi hingga ekologi yang kompleks dengan sebaran aktor yang lebih plural (PLOD UGM, 2004).

Dari berbagai persoalan yang disebutkan, saya sengaja hanya mendiskusikan dimensi politik dan identitas kultural yang secara nyata telah membentuk pembilahan struktur politik di Babel. **Persoalan dimensi politik dan identitas kultural berbasis spasial pada mulanya tidak begitu mengkhawatirkan—mengingat ada semacam konsensus dari elit-elit politik di Babel. Konsensus yang dimaksud adalah penjadwalan dalam menempatkan jabatan-jabatan politik di Babel seperti: jika gubernurnya (eksekutif) dari Pulau Bangka maka ketua DPRD Provinsi (legislatif) dari Pulau Belitung. Tak hanya itu. Jika gubernurnya dari Pulau Bangka maka jabatan wakil gubernur harus dari Pulau Belitung. Hal lainnya lagi, jika gubernurnya dari Pulau Bangka paling lama untuk dua periode kepemimpinan, dan kepemimpinan berikutnya diserahkan kepada Putra Daerah dari Belitung dengan skema 2:1.¹² Konsensus**

tertuliskan ini ternyata cukup efektif dalam menyatukan perbedaan kepentingan elit politik di Babel ketika itu (catatan pribadi).

Seiring perjalanan waktu, realitas politik yang bisa diselesaikan melalui konsensus seperti yang dibayangkan oleh elit-elit politik di Babel tadi ternyata menjadi buyar dengan sendirinya sejak Indonesia memperkenalkan mekanisme Pemilu secara langsung di tahun 2005. Bagi mimpi buruk, pemberlakuan model pemilu secara langsung dalam menentukan jabatan politik di daerah begitu menyakitkan bagi kalangan elit politik di Pulau Belitung. Betapa tidak. Jika dilihat dari perbandingan komposisi penduduk dan mata pilih yang akan menentukan siapa pemimpin terpilih, Pulau Bangka yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota (Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Tengah) merupakan sebaran penduduk yang paling dominan jika dibandingkan dengan Pulau Belitung yang hanya berjumlah 2 Kabupaten yakni Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Artinya, jika diserahkan pada publik maka bisa diperkirakan peluang-peluang bagi putra daerah dari Pulau Belitung dalam menduduki jabatan gubernur yang harus bersaing dengan putra daerah berlatarbelakang Pulau Bangka sudah sema-

jabatan gubernur (2002-2007) berasal dari Pulau Bangka sementara wakilnya dari Pulau Belitung, periode ke dua (2007-2012) masih mengikuti pola yang sama. Untuk periode ke tiga (2012-2017) baru dijabat oleh Putra Daerah dari Pulau Belitung. Periode selanjutnya mengulangi pola yang sama (catatan pribadi). Tentu saja skema ini akan berjalan efektif jika pemilihan jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui anggota DPRD Provinsi bukan dalam proses Pemilu secara langsung yang ditentukan oleh pemilih di Babel—perlu diperhatikan, Babel berdiri sebagai sebuah provinsi baru pada tahun 2000. Karena masih baru dibentuk, maka untuk persiapan dalam transisi peralihan kekuasaan dari Palembang maka ditunjuk Pejabat Sementara dari tahun 2000-2002 sampai Babel siap memulai suksesi politik yang pertama di tahun 2002 (catatan pribadi).

¹² Skema 2:1 ini dijelaskan sebagai berikut: periode pertama

kin tertutup. Terbukti memang, di dua Pemilu-kada pada tahun 2007 dan 2012, semua kandidat gubernur dari Pulau Belitung harus kalah dengan kandidat dari Pulau Bangka.

Adanya perubahansecarainstitusional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur inilah menurut dugaan saya menjadi akar menguatnya politik primordial berbasis kedaerahan di Babel. Alasannya tentu saja sangat sederhana: ada kekhawatiran di kalangan masyarakat—utamanya di Pulau Belitung—bahwa masyarakat di pulau ini kurang terwakili dalam aspirasi politiknya. Kenyataan demikian barangkali dianggap oleh kalangan elit politik di Pulau Belitung sebagai pengulangan sejarah ketika masih menjadi bagian dari Palembang. Hanya saja dalam konteks ini yang menggantikan posisi Palembang adalah Pulau Bangka (catatan pribadi).

Oleh karenanya, tak terlalu mengejutkan jika publik di Pulau Belitungbegitu solid dalam mempertimbangkan pilihan politiknya seperti yang dialami oleh Yusron Ihza Mahendera di Pemilu-kada 2012.¹³ Terjadinya perbuahan institusional di era demokratisasi inilah yang menurut keyakinan Betrand (2004) berimplikasi bagi fenomena kebangkitan isu primordial yang dijadikan rasion de etre untuk merespon perkembangan politik yang ada baik dalam kapasitasnya sebagai pemicu kekhawatiran ataupun sebagai sebuah kesempatan.¹⁴

2. Ketersumbatan Keterwakilan Politik

Sebagai konsekuensi dari yang pertama tadi,

13 Di Pemilu-kada 2012 Yusron Ihza Mahendera merupakan politisi yang paling diandalkan sebagai wujud perwakilan politik dari Pulau Belitung. Sebaran suara Yusron Ihza Mahendera di Pulau Belitung ketika itu mencapai angka 78% dukungan dari masyarakat (catatan pribadi).

14 Seperti yang dikutip oleh Firman Noor dalam makalahnya yang bertemakan “Demokratisasi dan Kebangkitan Politik Identitas Primordialisme di Indonesia: Akar Penyebab, Kecenderungan, dan Alternatif Solusi”.

maka persoalan ketersumbatan dari keterwakilan politik bagi publik di Pulau Bangka dan Pulau Belitung menjadi cerita yang terus mewarnai dalam setiap momen politik di arena Pemilu-kada Gubernur. Anggapan-anggapan yang berkembang di masyarakat seperti: jika gubernurnya dari Pulau Bangka maka pembangunan struktur ekonomi, sosial dan budaya hanya difokuskan di Pulau Bangka saja sedangkan Pulau Belitung ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya. Jika gubernurnya dari Pulau Belitung maka Pulau Bangka dijadikan “anak tiri” pada setiap proses pembangunan (catatan pribadi). Melalui dugaan yang tidak mendasar ini maka publik di kedua gugus pulau tadi sangat berkepentingan agar putra daerahnya tampil sebagai pemimpin di Babel untuk periode lima tahunan. Fenomena inilah yang disebut oleh Gurr (1993) mengisyaratkan bahwa persoalan ketimpangan keterwakilan politik memainkan peran yang penting dalam memicu kebangkitan sentimen primordial di era demokratisasi terutama yang berkaitan dengan disproporsionalitas keterwakilan kelompok-kelompok primordial.¹⁵

Berbagai kekhawatiran yang telah disebutkan selalu dimanfaatkan dengan cermat oleh para politisi agar mendapatkan dukungan politik di masing-masing basis primordialnya. Begitu asiknya bermain di sentimen emosional ini, politisi yang berkompetisi tidak terlalu mementingkan agenda visi-misinya untuk membangun Babel. Celakanya lagi, publik juga mengabaikan dan kurang memperhatikan agenda kerja yang ditawarkan kepada masyarakat apa yang akan dilakukannya nanti setelah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Padahal, di era kekinian, persoalan ketersumbatan keterwakilan politik sudah tidak menemukan relevansinya lagi. Alasannya, masyarakat di level Kabupaten/Kota sudah memiliki peluang

15 Seperti yang dikutip oleh Noor, op.,cit

yang besar untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kepentingan basis-basis sosial. Kenyataan ini bisa dilihat dari proses pemilihan bupati/walikota, anggota DPRD Kabupaten/Kota hingga pemilihan kepala desa. Kondisi ini akan berbeda jika pemilihan pejabat politik di level lokal ditentukan oleh Pemerintah Pusat seperti era Orde Baru. Belum lagi dengan skema pemberlakuan model pemerintahan yang menganut sistem otonomi daerah seperti saat ini. Secara otonomatis menganulir berbagai kekhawatiran terhadap peluang-peluang kebuntuan aspirasi politik di Babel.

D. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Status yang Terlembaga

Kecenderungan pembahasan tentang konsolidasi politik berbasis primordial selama ini didominasi oleh pemanfaatan identitas asal daerah telah menggeser isu lainnya seperti kesejahteraan, kerusakan lingkungan, banjir, kemiskinan dan lain sebagainya menjadi salah satu strategi untuk mendulang suara dari publik di Babel.

Padahal, keberadaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terlembaga. Artinya, siapapun pemimpin yang terpilih maka sudah dipastikan akan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada. Sebuah contoh misalnya, meskipun gubernurnya dari Pulau Bangka bukan berarti Pulau Belitung diacuhkan begitu saja dalam setiap proses pembangunan. Hal yang sama juga terjadi sebaliknya. Bahkan, jika jabatan gubernur dipegang oleh Pejabat Sementara misalnya bukan berarti tanggung jawab pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik juga berhenti begitu saja.

Begitu juga dengan mekanisme distribusi pembagian transfer keuangan daerah—baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi—untuk kabupaten/kota sudah terlembaga

dengan baik. Sederhananya, siapapun yang menjadi gubernur dan wakil gubernur di Babel telah memiliki kewenangan dan kewajiban yang melekat. Oleh karenanya, kekhawatiran untuk mendapatkan perlakuan yang kurang adil harus disingkirkan jauh-jauh dari benak kita.

Seperti yang telah disebutkan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan status yang terlembaga maka hal paling penting untuk kita lakukan adalah bagaimana mengawal proses pembangunan dan jalannya roda pemerintahan yang sudah terlembaga tadi. Dari mana memulainya? Saya menawarkan dari pengawalan visi-misi kandidat sebagai rujukan bagi kita untuk menentukan pemimpin Babel di masa mendatang.

E. Epilog: Apa yang Dikhawatirkan?

Penguatan politik berbasis primordial di Babel merupakan potret diri dari pergaulan politik lokal. Dari beberapa pengalaman Pemilu—baik beskala nasional hingga lokal—menguatkan kecenderungan dari bekerjanya politik berbasis kedaerahan yang sangat spasial antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Munculnya sentimen kedaerahan di Babel bermula pada perubahan institusional dan ketersumbatan perwakilan politik yang mengakibatkan kegelisahan dari berbagai aktor politik dan demokrasi yang ada. Bahkan untuk Pemilu 2017 yang akan datang juga menunjukkan kecenderungan yang sama.

Kondisi demikian menjadi tantangan yang sangat rumit ditengah kesadaran politik di masyarakat yang lebih mempertimbangkan sentimen emosional kedaerahan dibandingkan dengan mencermati visi-misi kandidat yang ditawarkan untuk Babel. Padahal, jalannya roda pemerintahan di Babel untuk menjadikan kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera, aman, dan damai bukan ditentukan oleh latarbelakang asal daerah

tetapi kapasitas seorang pemimpin yang dijabarkan dalam visi-misi politiknya.

Oleh karenanya, kita jangan terlalu khawatir dan disibukkan dengan permainan isu-isu putra daerah disetiap perhelatan demokrasi di aras lokal. Hal yang perlu dicemaskan adalah putra daerah yang kita banggakan dan elu-elukan ternyata tidak memiliki agenda kerja yang nyata bagi kebaikan Babel. Jadi, siapapun pemimpin yang dipilih jangan terlalu digugat latarbelakang daerahnya. Persoalkanlah program kerja yang ditawarkan semisal: bagaimana mengatasi persoalan banjir, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan serta penghentian kerusakan lingkungan yang telah mengancam dan terus membayangi—sehingga mengganggu tidur pulas— keseharian kita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Evans, Kevin. R, 2003, “Sejarah Pemilu dan Parpol di Indonesia”, PT. Arise Consultancies, Jakarta.

Salim HS, Hairus, dkk, 1999. “Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999”, LKIS, Yogyakarta.

Laporan Penelitian, Tesis, Makalah:

Noor, Firman, 2008, “Demokratisasi dan Kebangkitan Politik Identitas Primordialisme di Indonesia: Akar Penyebabnya, Kecenderungan dan Alternatif Solusi”, Makalah, Tidak Dipublikasikan.

Ranto, 2014, “Perilaku Memilih Etnis Tionghoa: Studi Kasus Perilaku Memilih Masyarakat Etnis Tionghoa Pada Pemilu Legislatif DPR-Tahun 2009 di Kabupaten Bangka”, Tesis S2 Ilmu Politik UGM, Tidak Dipublikasikan.

Ranto, dkk, 2007, “Birokrasi Meritokrasi: Peluang dan Tantangan dalam Masyarakat Spasial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, Makalah, Tidak Dipublikasikan.

Tim PLOD UGM, 2004, “Sungai Kecil Buayanya Banyak: Memetakan Problema Politik Ekonomi Provinsi Baru (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”, Draf Laporan Penelitian Integratif S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Tidak Dipublikasikan.

Media Massa/Koran Lokal:

BangkaPos, “Hidayat Arsani Lebih Ingin Darmansyah Husein atau Andrea Hirata Mendampinginya”, Kamis 25/02/2016

BangkaPos, “Gubernur Harus Orang Bangka Itu Menyesatkan”, Sabtu 27/02/2016

BangkaPos, “Mantan Bupati Bangka Calon Ideal Pendamping Rustam Maju Pilgub 2017”, Rabu, 2/02/2016